

Katalog: 7203005.53  
ISSN 2528-2158

*Statistik*

**KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Volume 14, 2023

**2022**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



# Statistik

## KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Provinsi Nusa Tenggara Timur

Volume 14, 2023

2022

<https://ntt.bps.go.id>



# **STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022**

**Volume 13, 2023**

Katalog : 7203005.53  
ISSN : 2528-2158  
Nomor Publikasi : 53000.2354  
Periode Terbit : Tahunan  
Ukuran Buku : A4 (21 x 29,7 cm)  
Jumlah Halaman : x + 42 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Diterbitkan oleh : ©Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Dicetak oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

---

**TIM PENYUSUN**

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022**

**Volume 13, 2023**

**Pengarah:**

Matamira B Kale

**Penanggung Jawab:**

Demarce M. Sabuna

**Penulis Naskah:**

Fandi Akhmad

**Penyunting:**

Demarce M. Sabuna

**Desain dan Layout:**

Fandi Akhmad



## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur 2022 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Publikasi ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data terhadap data statistik keuangan pemerintah daerah.

Data yang disajikan dalam bentuk publikasi ini memuat data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari kantor Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh kantor Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Saran dan kritik berbagai pihak dalam rangka perbaikan publikasi ini pada masa mendatang sangat kami harapkan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud, kami mengucapkan terima kasih.

Kupang, Oktober 2023

Kepala Badan Pusat Statistik  
Propinsi Nusa Tenggara Timur,



**Matamira B Kale**





**DAFTAR ISI**  
**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022**  
**Volume 13, 2023**

	<b>Hal</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>BAB I Penjelasan Umum</b>	1
1.1. Pendahuluan .....	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan data.....	1
1.3. Konsep dan Definisi .....	1
<b>BAB II Ringkasan Analisis Keuangan Pemerintah Daerah</b>	7
<b>BAB III Kesimpulan</b>	15
<b>Daftar Pustaka</b>	17
<b>LAMPIRAN</b>	19



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
2.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT	9
2.2.	Rincian Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022	10
2.3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	11
2.4.	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
2.5.	Rincian Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022	13
2.6.	Alokasi dan Realisasi Dana Desa di NTT	14
1	Lampiran1. Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022	20
2	Lampiran 2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022	32



# I. PENJELASAN UMUM

## 1.1. Pendahuluan

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rutin setiap tahun, yang menyajikan data tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2022.

Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan data keuangan pemerintah daerah di Provinsi NTT terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Untuk itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan analisis dalam membuat kebijakan dan mengeksekusi program kerja dengan tepat.

## 1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data statistik keuangan daerah ini diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kantor gubernur NTT yang dikumpulkan menggunakan daftar K-1 dan APBD-1, dan dari kantor Bupati/Walikota di Provinsi NTT yang mencakup 22 kabupaten/kota yang dikumpulkan dengan menggunakan daftar K-2 dan APBD-2.

## 1.3. Konsep dan Definisi

### 1.3.1. Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- **Pajak daerah** adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan ke daerah.

- **Retribusi daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan** adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba PDAM, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non-bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
  - **Lain-lain PAD yang sah** termasuk rincian ini antara lain: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain.
- b. Pendapatan Transfer** yaitu pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan.
- **Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
    - Dana transfer umum-Dana bagi hasil (DBH) adalah pendapatan yang mencakup DBH Pajak bumi dan bangunan, DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29, DBH PPH Pasal 21, DBH cukai hasil tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber daya alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu bara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.
    - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam

rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu dana yang dialokasikan dalam APBD kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  - **Dana insentif daerah** merupakan pendapatan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintah umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
  - **Dana Desa** adalah pendapatan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. **Pendapatan transfer antar daerah** yaitu pendapatan yang mencakup bantuan keuangan umum dan khusus baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota.
- d. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.



### 1.3.2. Belanja daerah

Belanja daerah terdiri dari:

**1.3.2.1. Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- Belanja Barang dan Jasa yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- Belanja Hibah yaitu belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa.
- Belanja Bantuan Sosial yaitu belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada organisasi masyarakat, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**1.3.2.2. Belanja Modal** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

- Belanja modal tanah yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan/pembuatan sertifikat tanah serta belanja administrasi lainnya.
- Belanja Modal peralatan dan mesin yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan gedung, bangunan monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol.
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.



- Belanja Modal Aset Tetap lainnya yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, pengadaan hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi.

**1.3.2.3. Belanja Tidak Terduga** yaitu pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

**1.3.2.4. Belanja Transfer** yaitu pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- Belanja bagi hasil yaitu pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa
- Belanja Bantuan keuangan yaitu pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

<https://ntt.bps.go.id>

## II. RINGKASAN ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berawal dari krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1998, Indonesia mengambil langkah besar untuk merevolusi struktur politik dan fiskal dari sentralistik menjadi desentralistik. Ditetapkannya Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang selanjutnya mengalami revisi penyempurnaan memberikan konsekuensi seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkannya dan diharapkan dapat dari otonomi daerah ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, mengakomodir partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, serta menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi kebutuhan dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi pertama dan utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah.

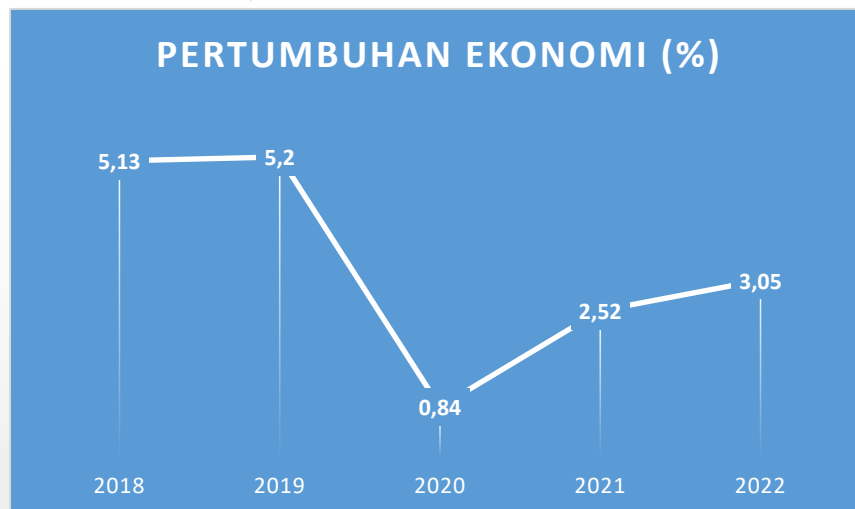
Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan masalah sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur. Dampak dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Segi positif penerapan desentralisasi fiskal adalah terciptanya efisiensi pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan terarah, karena dilakukan langsung oleh satuan-satuan pemerintahan di tingkat daerah.

Undang-undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memberikan sebagian besar hak pengelolaan keuangan ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengelola kebijakan fiskal yang bersifat makro. Daerah menerima lebih besar proposi keuangan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan yang ada daripada pusat. *Budgeting*

*participatory* adalah mekanisme baru yang mengikutsertakan masyarakat dalam merumuskan anggaran belanja daerah dari level terendah tingkat desa.

Sebagian komponen utama desentralisasi wewenang pemerintahan, desentralisasi fiskal harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan pemerintah pusat. Konsekuensinya adalah daerah memiliki hal penuh dalam memanfaatkan sumber-sumber utama pembiayaan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman agar desentralisasi fiskal dapat beroperasi sesuai dengan keinginan perencana. Selain itu, dengan adanya *fiscal gap* pemerintah daerah dituntut untuk menyiasatinya dengan mengidentifikasi pembayar pajak potensial, memperbaiki basis data obyek dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan. Dengan demikian, daerah harus dapat memperhitungkan kapasitas kemampuan basis penerimaan yang dimiliki, sehingga dapat menyeimbangkan antara penerimaan dan kebutuhan untuk membiayai belanja pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Desentralisasi diterapkan untuk melepaskan diri dari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintah, ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat keberhasilan pengelolaan anggaran pemerintah dari pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2018-2021:



**Grafik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2018-2022**  
Sumber: BPS 2018-2022



Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pembatasan kegiatan masyarakat pada masa COVID-19. Di Tahun 2022 perekonomian NTT sudah mulai memasuki masa pemulihan. Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi NTT 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT**

Tahun	APBD (000 Rp)	Realisasi Belanja (000 Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	4.781.089.963	4.846.839.267	101,37
2019	5.354.092.406	3.272.862.481	61,12
2020	5.419.935.335	5.755.258.016	101,37
2021	5.312.446.871	5.508.767.904	103,69
2022	4.426.473.562	4.816.652.654	108,81

Dari uraian tabel 2.1. menunjukkan adanya defisit APBD. Defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pemerintah daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan baik, sehingga terwujud tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dengan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Opini audit BPK berupa “wajar tanpa pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan daerah memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk berlomba memperbaiki kinerja keuangannya.

Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dianalisis dengan rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan. Beberapa variabel pengukuran kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan

daerah yang berasal dari sumber lainnya. Sedangkan rasio pertumbuhan merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan daerah Provinsi NTT tergambar pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Rincian Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022**

No	Jenis Pendapatan	Total Penerimaan (000 Rp)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.363.737.982</b>	<b>31,27</b>
1.1	Pajak Daerah	1.095.501.455	25,12
1.2	Retribusi Daerah	61.613.862	1,41
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.175.980	0,85
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	169.446.684	3,89
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.053.836.756</b>	<b>68,53</b>
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.053.836.756	68,53
2.1.1	Dana Perimbangan	3.053.836.756	68,53
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	65.358.115	1,48
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.730.933.330	39,10
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	487.528.051	11,01
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	756.060.269	17,08
2.1.2	Dana Insentif Daerah	13.956.241	0,32
2.1.3	Dana Desa	-	-
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>8.898.825</b>	<b>0,20</b>
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.426.473.562</b>	<b>100</b>

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pada tabel 2.3. dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi, bergerak antara 20-60 persen dalam kategori sedang hingga sangat baik dalam hal kemandirian

keuangan daerah, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik di Provinsi NTT.

**Tabel 2.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Dana Perimbangan (Ribu Rupiah)	Rasio Kemandirian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2022	1.363.737.982	3.053.836.756	0,313	31,27
2021	1.238.032.648	3.993.215.834	0,310	31,00
2020	1.166.570.596	4.152.039.227	0,281	28,10
2019	1.258.956.853	4.069.622.423	0,309	30,94
2018	1.096.370.136	3.680.327.635	0,298	29,79
2017	1.047.491.567	3.643.692.862	0,287	28,75
2016	966.858.995	2.864.659.141	0,338	33,75
2015	882.315.240	1.461.992.423	0,604	60,35
2014	763.337.478	1.282.745.347	0,595	59,51
2013	528.832.134	1.165.848.623	0,454	45,36
2012	459.657.187	1.098.619.869	0,418	41,84
2011	391.828.733	887.291.439	0,442	44,16

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan ini berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai total pendaptan daerah, PAD dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari

periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, Pad dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Berikut adalah tabel rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Rasio Pertumbuhan	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2022	1.363.737.982	0,10	10,15
2021	1.238.032.648	0,06	6,12
2020	1.166.570.596	(0,07)	(7,34)
2019	1.258.956.853	0,15	14,83
2018	1.096.370.136	0,05	4,67
2017	1.047.491.567	0,08	8,34
2016	966.858.995	0,10	9,58
2015	882.315.240	0,16	15,59
2014	763.337.478	0,44	44,34
2013	528.832.134	0,15	15,05
2012	459.657.187	0,17	17,31
2011	391.828.733		

Berdasarkan tabel 2.4 Dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD Provinsi NTT tahun 2011 hingga 2022 menunjukkan peningkatan setiap tahun berfluktuatif dengan peningkatan rasio terbesar pada tahun 2014 diharapkan pemerintah Provinsi NTT dapat meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya.



Belanja daerah merupakan penggerak ekonomi daerah yang memberikan *multiplier effect* di berbagai sektor ekonomi lainnya. Hal ini dapat terjadi apabila belanja daerah dioptimalkan untuk kegiatan produktif.

**Tabel 2.5. Rincian Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Total Pengeluaran (000 Rp)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.051.851.164</b>	<b>63,36</b>
1	Belanja Pegawai	1.421.874.102	29,52
2	Belanja Barang dan Jasa	1.208.109.064	25,08
3	Belanja Bunga	54.539.281	1,13
4	Belanja Subsidi		
5	Belanja Hibah	335.277.916	6,96
6	Belanja Bantuan Sosial	32.050.800	0,67
	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.216.802.447</b>	<b>25,26</b>
1	Belanja Modal Tanah	1.050.295	0,02
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.284.449	3,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.655.437	2,94
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	909.704.836	18,89
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.107.430	0,42
	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>7.228.174</b>	<b>0,15</b>
	<b>Belanja Transfer</b>	<b>540.770.870</b>	<b>11,23</b>
1	Belanja Bagi Hasil	527.502.870	10,95
2	Belanja Bantuan Keuangan	13.268.000	0,28
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>4.816.652.654</b>	<b>100</b>

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat pada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desanya. Dana desa dialokasikan kepada setiap desa setiap tahun sebagai salah satu pendapatan desa. Alokasi dana desa saat ini bertujuan untuk mendukung visi misi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa namun dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Di tahun 2021, alokasi dana desa diperuntukkan bagi 2.036 desa mencapai Rp.3,06 triliun. Di tahun 2021, Dana desa yang dialokasikan digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 melalui mekanisme bantuan langsung tunai (BLT-desa). Tabel 2.6. menunjukkan bahwa dalam empat tahun ini (2018-2021) realisasi anggaran dana desa hampir 100 persen.

**Tabel 2.6. Alokasi dan Realisasi Dana Desa di NTT**

Dana Desa	Alokasi	Realisasi	Persen Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	2.549.545.916	2.548.419.000	99,96
2019	3.020.504.603	3.014.436.180	99,80
2020	3.057.358.070	3.057.128.256	99,99
2021	3.059.653.902	3.044.008.478	99,50
2022	2.805.512.355	2.736.462.328	97,54

Sumber: Kementria Desa (2023)

### III. KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Diperlukan perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dengan menjelaskan rinci penerimaan daerah dan sumber-sumbernya. Selain itu pengelolaan defisit anggaran daerah dengan baik, manajemen sistem keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.
- 2) APBD merupakan wujud dari implementasi perencanaan daerah yang mengacu pada perencanaan nasional, oleh karena itu penyusunan harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD berpedoman pada rencana kerja pemerintah nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan nasional. APBD juga berfungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas ekonomi.
- 3) Pengelolaan APBD menjadi penting pada tahapan perencanaan keuangannya. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahapan perencanaan ini. Di tahap pelaksanaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah diimplementasikan untuk mempermudah pengelolaan APBD. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas terlaksananya pengelolaan keuangan daerah. Apabila tahap pelaksanaan didukung dengan penggunaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, diharapkan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban tidak akan menemui banyak masalah. Untuk dapat menghasilkan laporan yang baik, diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan daerah.
- 4) Beberapa faktor yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik antara lain:
  - Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi manajemen aset daerah.
  - Sarana dan prasarana pada instansi terkait pengelolaan anggaran

<https://ntt.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Imam Mugroho, dan Tri Laksono. 2005. "Desentralisasi fiskal: Kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia". Malang: UB Press.
- Halim, Abdul. 2012. "Pengelolaan keuangan daerah". Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hamsiah, Andi. 2019. "Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah". Pustaka AQ. Yogyakarta.
- Karimah, F., Saleh, C., Wanasmawatie, I. 2014. "Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat". *Jurnal Administrasi Publik (JIAP)*, Vol 2 No 4, 597-602.
- Kementerian Keuangan, Kanwil DJPB Provinsi NTT. 2022. "Kajian fiskal regional tahun 2021". Kupang.
- Republik Indonesia. 2020. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2017. "Buku Pintar Dana Desa". Jakarta: Kementerian keuangan.
- Wahab, La O. A., et al. 2017. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, vol. 2, no. 3.



<https://ntt.bps.go.id>

# LAMPIRAN 1

**Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

<https://ntt.bp.go.id>

**Tabel 1. Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Sumba Barat	Sumba Timur
	(1)	(2)	(3)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>70.445.312</b>	<b>92.198.180</b>
	Pajak Daerah	27.074.133	30.187.942
	Retribusi Daerah	2.721.501	3.199.599
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.531.104	5.365.179
	Lain-lain PAD yang Sah	36.118.573	53.445.462
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>599.403.659</b>	<b>1.037.151.342</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	581.946.277	1.010.202.885
	Dana Perimbangan	497.135.120	865.089.641
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	10.384.414	15.906.982
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	370.784.608	897.286.049
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	94.551.943	191.210.897
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	21.414.155	60.685.713
	Dana Insentif Daerah	13.804.604	21.882.610
	Dana desa	71.006.553	123.230.634
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.457.382	26.948.456
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>23.407.439</b>	<b>42.060.940</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>693.256.410</b>	<b>1.171.410.461</b>



**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Kupang	Timor Tengah Selatan
	(1)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>52.409.861</b>	<b>46.784.071</b>
	Pajak Daerah	24.696.714	13.787.862
	Retribusi Daerah	4.423.883	5.895.799
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.102.053	5.680.913
	Lain-lain PAD yang Sah	15.187.206	21.419.497
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.059.758.734</b>	<b>1.282.006.447</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	1.029.404.819	1.241.463.423
	Dana Perimbangan	872.581.884	965.101.368
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12.875.935	12.571.119
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	627.736.067	703.960.733
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	111.217.031	177.148.309
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	120.752.850	72.421.207
	Dana Insentif Daerah	4.100.298	-
	Dana desa	152.722.637	276.362.055
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.353.915	40.543.024
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>65.512.372</b>	<b>72.260.776</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,177,680,967</b>	<b>1.401.051.294</b>

**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Timor Tengah Utara	Belu
	(1)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>40.130.796</b>	<b>70.137.377</b>
	Pajak Daerah	9.872.768	17.028.865
	Retribusi Daerah	3.177.356	5.411.699
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.829.681	3.734.076
	Lain-lain PAD yang Sah	20.256.991	42.995.587
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>977.948.535</b>	<b>753.195.218</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	953.696.246	719.924.800
	Dana Perimbangan	797.191.592	644.243.726
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12.164.134	11.134.534
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	553.289.429	456.412.029
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	173.735.944	102.965.063
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	58.002.086	73.548.707
	Dana Insentif Daerah	4.091.410	-
	Dana desa	152.413.243	75.681.074
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.252.289	24.152.903
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>41.382.990</b>	<b>34.559.773</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.059.462.321</b>	<b>847.807.707</b>

**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

	Jenis Penerimaan	Alor	Lembata
	(1)	(8)	(9)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>65.038.649</b>	<b>41.605.947</b>
	Pajak Daerah	14.210.737	12.537.250
	Retribusi Daerah	31.993.798	20.687.365
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.055.507	2.474.365
	Lain-lain PAD yang Sah	17.778.607	5.906.967
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>934.729.009</b>	<b>727.806.014</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	915.741.417	711.302.997
	Dana Perimbangan	761.904.479	581.593.055
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	8.876.952	10.514.487
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	565.244.405	436.974.250
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	121.337.340	88.678.698
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	66.445.782	45.425.619
	Dana Insentif Daerah	2.399.639	6.368.630
	Dana desa	151.437.299	123.341.312
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.987.592	16.503.017
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>33.162.260</b>	<b>33.487.320</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.032.929.918</b>	<b>802.899.281</b>

**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Flores Timur	Sikka
	(1)	(10)	(11)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>55.180.839</b>	<b>96.656.645</b>
	Pajak Daerah	13.645.900	21.604.888
	Retribusi Daerah	33.962.697	8.304.664
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.777.813	1.707.467
	Lain-lain PAD yang Sah	4.794.429	65.039.625
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.001.474.746</b>	<b>952.943.641</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	974.505.649	923.537.516
	Dana Perimbangan	803.391.382	767.396.625
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	11.383.613	13.325.698
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	582.187.043	579.230.812
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	121.142.104	90.601.417
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	88.678.621	84.238.699
	Dana Insentif Daerah	2.713.288	14.806.884
	Dana desa	171.111.554	141.334.007
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.258.522	29.406.125
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>35.176.623</b>	<b>42.276.036</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.091.832.208</b>	<b>1.091.876.322</b>

**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

	Jenis Penerimaan	Ende	Ngada
	(1)	(12)	(13)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>71.474.530</b>	<b>45.819.017</b>
	Pajak Daerah	18.013.613	7.838.338
	Retribusi Daerah	4.501.819	4.902.153
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.488.372	801.256
	Lain-lain PAD yang Sah	46.470.726	32.277.270
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.025.110.738</b>	<b>699.073.182</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	1.000.303.834	680.412.935
	Dana Perimbangan	806.076.669	567.305.808
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	14.844.172	10.720.413
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	583.447.190	439.279.613
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	126.464.534	69.129.306
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	81.320.773	49.176.476
	Dana Insentif Daerah	3.106.574	8.488.263
	Dana desa	191.120.591	104.618.865
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.806.905	18.660.247
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>34.552.259</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.131.137.527</b>	<b>764.730.433</b>



**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Manggarai	Rote Ndao
	(1)	(14)	(15)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>110.722.937</b>	<b>24.189.482</b>
	Pajak Daerah	17.591.100	11.165.928
	Retribusi Daerah	6.636.049	5.486.843
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.371.631	3.920.742
	Lain-lain PAD yang Sah	83.124.157	3.615.970
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>919.332.114</b>	<b>744.438.851</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	890.891.745	727.034.661
	Dana Perimbangan	767.706.164	623.618.977
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	14.278.835	10.570.069
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	548.841.188	419.857.979
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	118.652.389	138.234.077
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	85.933.750	54.956.852
	Dana Insentif Daerah	-	4.837.632
	Dana desa	123.185.581	98.578.052
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.440.368	17.404.190
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>60.310.077</b>	<b>32.067.394</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.090.365.130</b>	<b>800.695.727</b>

**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Manggarai Barat	Sumba Tengah
	(1)	(16)	(17)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>190.816.712</b>	<b>22.036.752</b>
	Pajak Daerah	141.461.757	6.145.787
	Retribusi Daerah	41.417.841	3.074.947
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.720.173	3.056.556
	Lain-lain PAD yang Sah	5.216.940	9.759.462
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.004.830.794</b>	<b>594.382.540</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	980.265.861	580.082.675
	Dana Perimbangan	834.424.885	514.828.742
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	11.177.907	9.618.092
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	495.899.734	330.217.969
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	257.974.030	133.660.632
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	69.373.214	41.432.049
	Dana Insentif Daerah	-	2.399.568
	Dana desa	145.840.976	62.754.365
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.564.933	14.299.865
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>60.005.158</b>	<b>10.808.275</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.255.652.664</b>	<b>627.227.567</b>

**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Sumba Barat Daya	Nagekeo
	(1)	(18)	(19)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>31.715.598</b>	<b>34.260.034</b>
	Pajak Daerah	19.306.219	5.588.247
	Retribusi Daerah	1.746.672	2.879.650
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.336.716	2.207.176
	Lain-lain PAD yang Sah	6.325.992	23.584.961
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>902.937.128</b>	<b>662.574.102</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	879.153.189	644.616.163
	Dana Perimbangan	662.845.692	563.120.192
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	10.204.298
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	407.250.886
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	66.810.173
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	-	78.854.836
	Dana Insentif Daerah	2.301.731	1.150.865
	Dana desa	214.005.766	80.345.106
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.783.939	17.957.939
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>65.218.919</b>	<b>6.019.350</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>999.871.645</b>	<b>702.853.486</b>



**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Manggarai Timur	Malaka
	(1)	(20)	(21)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>63.965.192</b>	<b>35.315.662</b>
	Pajak Daerah	13.741.201	9.443.000
	Retribusi Daerah	3.615.500	1.379.960
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.335.891	4.166.608
	Lain-lain PAD yang Sah	9.395.034	20.326.094
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>956.356.610</b>	<b>728.772.449</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	932.677.707	707.009.880
	Dana Perimbangan	760.725.506	593.440.087
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	10.650.855	8.450.525
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	478.716.856	422.513.118
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	162.141.609	102.269.531
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	109.216.192	-
	Dana Insentif Daerah	1.938.300	4.066.693
	Dana desa	170.013.901	109.503.100
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.678.903	21.762.569
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>70.280.795</b>	<b>36.012.196</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.059.724.001</b>	<b>800.100.300</b>

**Tabel 1. Lanjutan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Penerimaan		Sabu Raijua	Kota Kupang
	(1)	(22)	(23)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>30.976.942</b>	<b>191.087.265</b>
	Pajak Daerah	5.661.975	110.738.225
	Retribusi Daerah	18.160.727	64.276.807
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.329.492	6.873.518
	Lain-lain PAD yang Sah	4.824.749	9.198.716
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>514.572.199</b>	<b>820.019.934</b>
	Transfer Pemerintah Pusat	500.965.699	759.366.091
	Dana Perimbangan	440.083.422	756.761.126
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	9.647.359	31.367.954
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	336.360.812	605.048.847
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	67.719.045	53.820.248
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	26.384.306	66.524.076
	Dana Insentif Daerah	-	2.604.965
	Dana desa	60.882.277	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.606.500	60.653.844
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>885.826</b>	<b>55.411.918</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>568.428.975</b>	<b>1.066.519.118</b>

# LAMPIRAN 2

**Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2022**

**Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Sumba Barat	Sumba Timur
	(1)	(2)	(3)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>435.668.746</b>	<b>328.624.421</b>
	Belanja Pegawai	181.407.754	484.371.174
	Belanja Barang dan Jasa	237.954.833	334.855.100
	Belanja Hibah	5.335.746	-
	Belanja Bantuan Sosial	10.970.413	-
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>142.909.584</b>	<b>236.725.660</b>
	Belanja Modal Tanah	307.352	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.291.662	45.683.764
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.868.071	53.821.362
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	82.876.818	137.211.136
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.565.681	9.398.360
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>234.000</b>	<b>34.176.718</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>109.156.302</b>	<b>203.089.007</b>
	Belanja Bagi Hasil	693.383	3.782.329
	Belanja Bantuan Keuangan	108.462.319	199.306.679
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>687.968.632</b>	<b>802.615.806</b>

**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Kupang	Timor Tengah Selatan
	(1)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>858.309.226</b>	<b>871.775.572</b>
	Belanja Pegawai	480.143.204	546.674.605
	Belanja Barang dan Jasa	376.354.518	311.827.996
	Belanja Hibah	1.297.710	9.977.225
	Belanja Bantuan Sosial	336.082	3.295.746
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>156.137.334</b>	<b>181.688.374</b>
	Belanja Modal Tanah	30.000	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.915.450	48.329.170
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.232.962	49.345.085
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	91.180.037	83.842.278
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.778.883	171.841.200
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.803.195</b>	<b>153.461.080</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>219.270.290</b>	<b>360.615.375</b>
	Belanja Bagi Hasil	2.542.237	-
	Belanja Bantuan Keuangan	216.728.053	360.615.375
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>1.235.520.045</b>	<b>1.414.232.782</b>



**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Timor Tengah Utara	Belu
	(1)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>703.062.988</b>	<b>493.069.322</b>
	Belanja Pegawai	394.710.758	330.911.536
	Belanja Barang dan Jasa	305.475.210	139.925.705
	Belanja Hibah	2.062.020	20.717.080
	Belanja Bantuan Sosial	815.000	1.515.000
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>163.384.456</b>	<b>85.270.395</b>
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.451.716	34.782.790
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.042.926	18.404.302
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	68.477.517	31.449.646
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.412.297	41.710
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>6.462.857</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>212.931.353</b>	<b>124.443.726</b>
	Belanja Bagi Hasil	-	1.165.767
	Belanja Bantuan Keuangan	212.931.353	123.277.075
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>1.085.841.654</b>	<b>702.783.445</b>

**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Alor	Lembata
	(1)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>656.213.847</b>	<b>501.183.225</b>
	Belanja Pegawai	361.127.696	301.481.512
	Belanja Barang dan Jasa	265.383.514	180.563.003
	Belanja Hibah	8.045.538	5.045.863
	Belanja Bantuan Sosial	21.657.099	8.892.500
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>172.918.278</b>	<b>249.758.103</b>
	Belanja Modal Tanah	55.300	3.917.953
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.179.918	22.654.556
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.827.869	20.611.697
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	62.668.302	200.252.655
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.186.889	2.321.241
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.550.000</b>	<b>94.710.807</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>212.042.496</b>	<b>169.183.146</b>
	Belanja Bagi Hasil	780.477	1.092.000
	Belanja Bantuan Keuangan	211.262.019	168.091.146
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>1.043.724.621</b>	<b>920.219.184</b>

**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Flores Timur	Sikka
	(1)	(11)	(12)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>724.038.720</b>	<b>819.955.992</b>
	Belanja Pegawai	423.830.845	466.138.860
	Belanja Barang dan Jasa	283.558.941	331.022.569
	Belanja Hibah	11.154.923	8.546.106
	Belanja Bantuan Sosial	5.398.462	3.814.000
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>96.101.526</b>	<b>191.918.117</b>
	Belanja Modal Tanah	2.821.836	3.085.099
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.332.839	43.082.003
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.536.070	45.896.393
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.107.551	99.342.916
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.303.229	511.705.000
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.724.661</b>	<b>3.352.465</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>250.382.256</b>	<b>203.510.842</b>
	Belanja Bagi Hasil	1.387.404	1.735.232
	Belanja Bantuan Keuangan	248.994.851	201.775.610
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>1.072.247.164</b>	<b>1.218.737.416</b>



**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Ende	Ngada
	(1)	(13)	(14)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>740.690.459</b>	<b>540.990.665</b>
	Belanja Pegawai	453.209.598	300.008.787
	Belanja Barang dan Jasa	234.181.050	222.850.316
	Belanja Hibah	52.881.794	6.217.860
	Belanja Bantuan Sosial	418.017	11.315.873
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>152.504.911</b>	<b>111.116.200</b>
	Belanja Modal Tanah	-	604.814
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.790.965	43.130.899
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.270.897	39.807.385
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	72.445.190	24.173.948
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.997.859	3.399.154
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.994.394</b>	<b>14.125.173</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>254.461.843</b>	<b>147.916.960</b>
	Belanja Bagi Hasil	3.415.822	629.357
	Belanja Bantuan Keuangan	251.046.021	147.287.603
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>1.149.651.607</b>	<b>814.148.999</b>

**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Manggarai	Rote Ndao
	(1)	(15)	(16)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>747.599.452</b>	<b>511.901.907</b>
	Belanja Pegawai	416.863.462	286.229.161
	Belanja Barang dan Jasa	267.835.774	216.805.592
	Belanja Hibah	60.060.498	7.450.654
	Belanja Bantuan Sosial	2.112.165	1.416.500
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>169.206.541</b>	<b>156.236.433</b>
	Belanja Modal Tanah	1.962.083	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.377.856	27.800.235
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.649.025	28.309.558
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	62.217.576	95.934.002
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	115.290
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.329.997</b>	<b>524.832</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>183.121.727</b>	<b>144.766.445</b>
	Belanja Bagi Hasil	3.847.557	1.429.879
	Belanja Bantuan Keuangan	179.274.169	143.336.566
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>1.105.257.718</b>	<b>813.429.616</b>

**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Manggarai Barat	Sumba Tengah
	(1)	(17)	(18)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>789.416.324</b>	<b>379.652.000</b>
	Belanja Pegawai	371.287.511	157.342.278
	Belanja Barang dan Jasa	392.905.825	187.318.342
	Belanja Hibah	18.184.280	9.896.480
	Belanja Bantuan Sosial	-	25.094.900
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>493.263.440</b>	<b>135.235.791</b>
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.845.232	30.716.391
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.623.544	29.954.159
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	292.362.220	74.557.088
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.432.443	8.153
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.173.880</b>	<b>481.686</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>208.426.596</b>	<b>97.354.413</b>
	Belanja Bagi Hasil	12.067.495	778.070
	Belanja Bantuan Keuangan	196.359.101	96.576.343
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>1.494.280.239</b>	<b>612.723.890</b>

**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Sumba Barat Daya	Nagekeo
	(1)	(19)	(20)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>570.080.765</b>	<b>476.000.097</b>
	Belanja Pegawai	274.705.755	267.524.612
	Belanja Barang dan Jasa	257.714.557	169.078.524
	Belanja Hibah	12.321.455	17.552.419
	Belanja Bantuan Sosial	25.338.999	21.844.543
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>144.594.598</b>	<b>113.999.290</b>
	Belanja Modal Tanah	150.000	3.059.090
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.273.353	13.940.303
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.681.833	17.863.001
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	80.845.120	70.200.187
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	105.184	8.936.710
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.323.355</b>	<b>4.450.062</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>282.628.277</b>	<b>126.674.931</b>
	Belanja Bagi Hasil	1.626.567	1,052,021
	Belanja Bantuan Keuangan	281.001.710	125.622.911
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>998.626.996</b>	<b>721.124.382</b>

**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Manggarai Timur	Malaka
	(1)	(21)	(22)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>622.219.432</b>	<b>586.203.641</b>
	Belanja Pegawai	349.048.164	328.420.173
	Belanja Barang dan Jasa	263.305.221	235.772.523
	Belanja Hibah	8.422.534	14.709.208
	Belanja Bantuan Sosial	903.600	7.301.737
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>182.084.491</b>	<b>137.023.274</b>
	Belanja Modal Tanah	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.057.553	30.330.740
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.443.066	57.158.803
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	94.801.318	48.894.402
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.782.554	639.249
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.950.657</b>	<b>4.427.603</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>221.441.299</b>	<b>155.705.543</b>
	Belanja Bagi Hasil	1.315.015	1.149.086
	Belanja Bantuan Keuangan	220.126.283	154.556.457
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>1.032.167.819</b>	<b>883.360.061</b>



**Tabel 2. Lanjutan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Jenis Belanja		Sabu Raijua	Kota Kupang
	(1)	(23)	(24)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>343.734.502</b>	<b>902.081.065</b>
	Belanja Pegawai	172.070.297	542.662.344
	Belanja Barang dan Jasa	161.022.634	333.821.954
	Belanja Hibah	7.739.068	4.627.144
	Belanja Bantuan Sosial	2.855.102	20.969.622
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>137.291.124</b>	<b>122.157.599</b>
	Belanja Modal Tanah	8.411.920	2.006.466
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	22.282.257
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.557.107	50.174.024
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan	93.612.264	45.087.434
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.865.619	2.607.418
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>216.152</b>	<b>2.785.617</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>96.182.679</b>	<b>-</b>
	Belanja Bagi Hasil	790.395	-
	Belanja Bantuan Keuangan	95.392.283	-
	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>577.424.456</b>	<b>1.261.499.785</b>



**D A T A**  
**MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
*BPS - Statistics of Nusa Tenggara Timur Province*

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111  
Telp. (0380) 826289, 821755; Fax. (0380) 833124  
Website: [ntt.bps.go.id](http://ntt.bps.go.id); Email: [bps5300@bps.go.id](mailto:bps5300@bps.go.id)

